

# GURU SEBAGAI PAHLAWAN TANPA TANDA JASA: PERSPEKTIF HEGEMONI DALAM PENDIDIKAN MENURUT ANTONIO GRAMSCI

---

Sofyan<sup>1</sup>, Fajrin Baidis<sup>2</sup>

Universitas Negeri Makassar  
sofyan@unm.ac.id

## Abstract

Teachers play a strategic role as the forefront of education in Indonesia, as stipulated in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The narrative of "unsung heroes" is often used as a tool of hegemony to suppress demands for teachers' welfare. This research aims to analyze how the narrative of unsung heroes is utilized to construct public perceptions of the teaching profession and its impact on teachers' welfare and social status. The research employs a literature study method with a bibliographic approach. Data were collected from various sources, including books, journals, media articles, and podcasts. The analysis is conducted using Antonio Gramsci's theory of hegemony, which explains how dominant groups gain influence through persuasion rather than coercion. The results indicate that the narrative of "unsung heroes" has become a legitimizing tool to normalize low salaries, excessive workloads, and discrimination against teachers, particularly non-permanent teachers. The song "Hymne Guru" and the use of the term hero in various contexts further reinforce this doctrine. Consequently, teachers often lack the space to advocate for their rights despite their significant contributions to education. This study concludes that the hegemony produced by this narrative affects the social, economic, and psychological conditions of teachers. Therefore, there is a need for collective awareness among teachers and fair government policies to improve their welfare and break the cycle of detrimental hegemony.

**Keywords:** Teacher, Unsung Hero, Doctrine.

## Abstrak

Guru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Narasi pahlawan tanpa tanda jasa sering kali digunakan sebagai alat hegemoni untuk menekan tuntutan kesejahteraan guru. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana narasi pahlawan tanpa tanda jasa digunakan untuk mengonstruksi persepsi masyarakat terhadap profesi guru, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan status sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan bibliografis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel media, dan podcast. Analisis dilakukan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menjelaskan bagaimana kelompok dominan memperoleh pengaruh melalui persuasi tanpa paksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi "pahlawan tanpa tanda jasa" telah menjadi alat legitimasi untuk menormalisasi rendahnya gaji, beban kerja berlebihan, dan diskriminasi terhadap guru, terutama guru honorer. Lagu Hymne Guru dan penggunaan istilah pahlawan dalam berbagai konteks semakin memperkuat doktrin ini. Akibatnya, guru cenderung tidak memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-haknya, meskipun kontribusinya terhadap pendidikan sangat besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hegemoni yang dihasilkan dari narasi tersebut memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis guru. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif di kalangan guru serta kebijakan

*pemerintah yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memutus rantai hegemoni yang merugikan.*

**Kata Kunci:** *Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Doktrin.*

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan kapasitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan yang menyiapkan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi.<sup>1</sup> Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah seorang yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 juga menegaskan jika guru merupakan pendidik yang profesional.

Penjelasan secara yuridis mengindikasikan bahwa dedikasi pengabdian guru terhadap pendidikan begitu besar. Tapi secara fakta di lapangan, penghargaan terhadap profesi guru tidak sekuat yang dibayangkan, padahal tugas yang dibebankan kepada guru sangatlah besar. Guru memiliki tugas, baik yang terikat dengan dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian.<sup>2</sup> Rincian tugas tersebut dapat dibagi menjadi tiga bentuk antara lain tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Selain itu, guru juga berperan dalam proses administrasi yang sangat rumit dan diwajibkan mengikuti peningkatan kapasitas dengan mengejar kegiatan di luar sekolah melalui seminar untuk memenuhi kredit.

Guru merupakan pewaris nilai dan agen dalam menanamkan nilai moral.<sup>3</sup> Peran guru tidak hanya sekedar membuat aturan agar siswa dapat patuh tapi guru perlu menerapkan pendekatan yang efektif agar terjadi internalisasi moral pada tiap siswa.<sup>4</sup> Belum lagi mengenai tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi penghalang tersendiri.

---

<sup>1</sup> Endang Pujiharti, "Peran Sumber Daya Pendidik Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan," *AN NAHDLIYYAH* 1, no. 2 (2022): 35-50; Dr Abd Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Samudra Biru, 2018).

<sup>2</sup> Ahmad Sopian, "Tugas, Peran, Dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan," *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 1, no. 1 (2016): 88-97.

<sup>3</sup> Aiman Faiz, "Peran Guru Dalam Pendidikan Moral Dan Karakter," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 315-18.

<sup>4</sup> Ahmad Munawir, "Dimensi Full Day School Dalam Budaya Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 2, no. 2 (2019), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/1438>.

Diskriminasi tenaga pendidik, sarana dan prasarana mengakibatkan proses belajar mengajar yang tidak maksimal di wilayah terpencil.<sup>5</sup> Tanggungjawab terhadap kurangnya fasilitas haruslah dimaksimalkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada siswa.<sup>6</sup>

Peningkatan kesejahteraan guru berdampak positif terhadap mutu input baik secara kuantitas maupun kualitas.<sup>7</sup> Hanya saja, secara faktual profesi guru seringkali tidak mendapat perhatian yang serius. Terutama mengenai tingkat kesejahteraannya. Data yang dihimpun pada tahun 2021 guru merupakan profesi yang terjerat pinjaman online yakni sebesar 42%.<sup>8</sup> Hal tersebut mengindikasikan jika kesejahteraan guru di Indonesia masih sangat jauh dari harapan.

Narasi jika guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa seakan-akan dipakai sebagai doktrinasi agar guru melupakan penghasilan dan fokus pada pengabdian. Pendekatan yang humanis melalui doktrin “guru pahlawan tanpa tanda jasa” dengan standar ganda agar guru untuk menerima gaji kecil dan menerima guru disebut sebagai pahlawan. Penghormatan terhadap guru bersifat simbolis melalui narasi pahlawan tanpa tanda jasa.<sup>9</sup> Sebuah julukan yang sangat positif tapi juga dapat melegitimasi guru untuk menerima segala tuntutan dan beban kerja yang diberikan dengan kesejahteraan yang tidak diperhatikan baik secara material maupun sosial.

Permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah bagaimana narasi pahlawan tanpa tanda jasa yang ditujukan kepada guru digunakan sebagai alat untuk meredam tuntutan kesejahteraan. Karena itu, penelitian ini menggunakan teori hegemoni yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci. Gramsci memiliki pandangan bahwa hegemoni sebagai cara suatu kelompok sosial memperoleh pengaruh secara persuasi, dengan menggiring kelompok sosial lain untuk bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan.

---

<sup>5</sup> Sulfasyah Sulfasyah and Hanis Nur, “Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 2 (2016): 60747.

<sup>6</sup> Ahmad Munawir, “PARADIGMA GURU DAN ORANGTUA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (September 17, 2019): 110–23.

<sup>7</sup> Rumlina Rumlina, “Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat,” *Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat* 20, no. 2 (2014): 211–22.

<sup>8</sup> Irfan Nabhani, Mikail Omar Nabhani, and Liani Asmarani Fitri, “Analisis Kondisi Keuangan Guru Honorer Di Jawa Barat Dan Implikasinya Pada Penggunaan Pinjaman Online,” *Jurnal Algoritma* 21, no. 1 (2024): 269–77.

<sup>9</sup> Indra Gunawan, “Hubungan Sebab Akibat Ungkapan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Terhadap Identitas Dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia,” *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (2018): 123–30.

Teori hegemoni Antonio Gramsci menjelaskan tentang sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan.<sup>10</sup> Sebuah konsep pemikiran yang dalam kenyataan disebarkan kepada masyarakat baik secara institusional maupun perorangan dan seluruh hubungan sosial, terutama pada makna intelektual dan moral. Kaum dengan kelas rendah dapat menjadi pemilik hegemoni jika perjuangan mereka berakar pada satu yang bersifat murni yang dapat mengikat secara keseluruhan dengan mengabaikan kepentingan sendiri-sendiri.<sup>11</sup>

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk mencari referensi yang sesuai dengan topik penelitian, baik dari buku, jurnal, maupun artikel. Studi kepustakaan merupakan tahapan penting seorang peneliti untuk mendalami sebuah teori, menemukan hal baru, dan mendeskripsikan perspektif yang lebih komprehensif dari penelitian.<sup>12</sup>

Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menekankan pada pendekatan untuk melakukan kajian pada sejumlah literatur yang sesuai sebagai fondasi untuk penelitian selanjutnya dengan tujuan untuk mendalami topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, pengumpulan data yang sesuai dengan topik ini akan dilakukan analisis berdasarkan jurnal, buku, media mainstream, podcast, dan media lain yang relevan.

Data yang dikumpulkan ini bersifat primer dan sekunder dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data yang dipakai yakni kualitatif deskriptif yang bertujuan melakukan kajian secara mendalam terhadap teori-teori umum yang ditemukan untuk menarik kesimpulan secara eksplisit. Temuan ini akan dihubungkan secara kontekstual terkini mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

Tanpa perlu dibesar-besarkan melalui narasi “guru pahlawan tanpa tanda jasa”, guru pada dasarnya sudah seperti itu. Sudah supatutnya

---

<sup>10</sup> Anita Maulidiyah, “Hegemoni SMA Darul Ulum 2 Unggulan Bppt Jombang Sebagai Cambridge International School (Cis) Id 113,” *Paradigma* 5, no. 3 (2017), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/21295>.

<sup>11</sup> Endah Siswati, “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci,” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 11–33.

<sup>12</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

masyarakat Indonesia menerima itu sebagai sebuah fakta. Bahwa guru memiliki peran yang sangat sentral dalam pendidikan. Jika mengacu pada undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169, huruf r menyebutkan syarat untuk maju sebagai calon presiden yakni "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat". Artinya, tidak akan ada seorang presiden di negeri ini tanpa bantuan dari seorang guru.

Data Persatuan Guru Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan terdapat 3.413.618 guru di seluruh tanah air. Rinciannya, 1.256.570 guru atau 36,81 persen berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 770.134 guru atau 22,56 persen berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), 902.531 guru atau 26,44 persen berstatus sebagai guru sekolah-sekolah swasta, dan 484.483 guru atau 14,19 persen yang berstatus tidak jelas alias honor yang belum terangkat di sekolah negeri. Dengan perbedaan status yang diakui oleh pemerintah telah memberikan diskriminasi terhadap guru. Sebab secara tupoksi di sekolah, baik PNS, PPPK, guru swasta dan honorer sama, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi sesuai dengan amanat dalam undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Secara kelas, guru honorerlah menjadi yang paling miris. Guru honorer dalam status yang tidak jelas itu dapat menjadi budak pendidikan. Dengan ganjaran gaji yang seadanya, diberikan pekerjaan yang sama, lebih sering lebih berat kelas guru yang lain seperti PNS, PPPK maupun guru swasta. Jika melawan, ancaman pemutusan kontrak dan kriminalisasi juga mengintai setiap saat. Dengan pemutusan kontrak, harapan bagi guru honorer untuk naik level menjadi PPPK akan pupus sudah. Tenaga guru honorer dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan guru, tetapi keberadaan mereka secara konseptual adalah liyan. Belum lagi, para guru honorer terancam akan diputus kontraknya secara sepihak dari instansi pemerintah akibat dari penerapan kebijakan pada Desember 2024. Sementara, sekolah pada dasarnya membutuhkan kehadiran mereka. Sebuah dilema yang memilukan.

Kurangnya apresiasi terhadap kesejahteraan guru menjadi permasalahan tersendiri dalam dunia pendidikan. Minat untuk menjadi guru terus mengalami penurunan.<sup>13</sup> Guru adalah sebuah profesi yang sangat tidak sejahtera jika disederajatkan dengan pekerjaan pada kualifikasi pendidikan

---

<sup>13</sup> Firani Zofiroh, Dewi Kusuma Wardani, and Khresna Bayu Sangka, "Pengaruh Persepsi Profesi Guru Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Menjadi Guru Ekonomi Dimediasi Oleh Motivasi," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 10, no. 3 (2022): 172-80; Mohammad Sugiharto, "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Program Ppg Dan Profesi Guru Terhadap Minat Menjadi Guru Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 3 (2019): 208-17.

yang sudah ditempuh. Investigasi yang dilakukan menemukan jika guru honorer dibayar berbeda dengan kisaran Rp.66.000/bulan hingga Rp.384.000/bulan. Hal tersebut sangat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi jika sudah berkeluarga. Tidak salah kemudian jika guru merupakan profesi terbanyak yang terjebak pinjaman daring. Belum lagi, penarikan pajak yang membabitkan dari pemerintah terus memberikan tekanan kepada guru.

Ketidakterdayaan guru atas nasibnya dengan gaji tidak layak berkesesuaian dengan narasi pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah narasi yang tidak lebih dari sekedar doktrin kepada guru untuk menerima dirinya sebagai budak pendidikan. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, bahwa hegemoni sebagai satu cara memperoleh pengaruh secara persuasi untuk mempengaruhi kelompok sosial lain berdasarkan keinginannya tanpa paksaan. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tidak boleh dijadikan kedok untuk menyenangkan guru sehingga harus diberi tanda jasa berupa tunjangan yang memadai. Gelar pahlawan tanpa tanda disandang oleh karena keikhlasan, kesabaran, kepedulian, dan dedikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, pahlawan tanpa tanda jasa disematkan kepada guru tidak sebagai simbol untuk mendapatkan upah yang layak.

Julukan yang diberikan kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa diperkirakan telah ada pada periode 1970-1980-an.<sup>14</sup> Pada masa itu, beban kerja guru tidak lebih baik dari apa yang ada sekarang, beban kerja tinggi dengan resiko yang amat besar tapi mendapat bayaran yang sangat rendah. Ketika guru meninggal, maka akan dimakamkan di taman makam pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Atas dasar inilah, menurut Anas, awal mula penyebutan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Penghargaan semu yang disematkan kepada alam pikir guru akan dimakamkan secara terhormat sejajar dengan para pahlawan adalah tipu muslihat.

Penguatan doktrinasi pahlawan tanpa tanda jasa, pemerintah kemudian membuat sebuah lagu Hymne Guru yang ditulis oleh Sartono. Penciptaan lagu Hymne Guru berawal dari sayembara yang dilakukan Dinas Pendidikan Nasional yang tidak lain merupakan perwujudan dari kementerian yang telah dibagi menjadi tiga saat ini yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada tahun 1978-an diciptakan Hymne Guru yang dimaksudkan untuk menghormati dan mengangkat citra dan martabat guru.

---

<sup>14</sup> Anas Basaruddin, "Secangkir Kopi Untuk Sang Guru: 33 Catatan Reflektif Penuh Inspirasi Untuk Para Pendidik," 2023, <https://philpapers.org/rec/BASSKU>.

Bahkan, pada salah satu liriknya mempertegas jika guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.

Akibat dari doktrinasi ini secara terus-menerus, guru tidak dapat memiliki ruang yang cukup untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebab, secara umum masyarakat telah mengakui dengan tidak sadar bahwa guru harus bekerja tanpa pamrih seperti pahlawan yang hidup dan matinya siap dikorbankan kepada negara. Bahkan, sekelas presiden pun tidak bergeming atas nasib para guru sebagaimana ketika Joko Widodo maupun Susilo Bambang Yudhoyono tidak menemui guru honorer ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan istana. Tidak heran kemudian, jika hari ini kita melihat guru banyak mendapat kekerasan, diskriminasi hingga kriminalisasi. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa menyebabkan guru mendapatkan masalah sosial, kultural dan psikologis.<sup>15</sup>

Teori hegemoni yang dijelaskan Antonio Gramsci disebarkan secara institusional maupun perorangan dengan memakai jubah intelektual dan moral. Pertama-tama, kemunculan lagu Hymne Guru diprakarsai oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Nasional tahun 1980-an sebagai jalan institusional yang nyata. Tidak berhenti disitu, lagu Hymne Guru ini juga dinyanyikan pada saat upacara penaikan bendera tiap hari Senin di sekolah. Manipulasi bunyi dalam bentuk bentuk asonansi dan mesodiplosis dengan kosa kata sederhana, penyampaian pesan melalui majas sehingga tidak membosankan tidak sebatas menyampaikan doktrin atau dogma.<sup>16</sup>

Kata pahlawan dalam lagu Hymne Guru seakan-akan meratifikasi kesetaraan guru masa kini dengan pahlawan guru dimasa lalu seperti halnya Ki Hadjar Dewantara, Tan Malaka maupun Tiro Adi Suryo yang menggerakkan para pribumi melalui pendidikan sebelum kemerdekaan, padahal secara konteks sangatlah berbeda dengan hari ini. Belum lagi, imajinasi akan dimakamkan di taman makam pahlawan semakin menambah doktrinasi terhadap guru untuk melupakan dalam memperjuangkan hak dasarnya yakni kesejahteraan

## Kesimpulan

Guru memegang peranan sentral dalam pendidikan Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penghargaan terhadap guru tidak sebanding dengan tanggung jawab

---

<sup>15</sup> Gunawan, "Hubungan Sebab Akibat Ungkapan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Terhadap Identitas Dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia."

<sup>16</sup> Norma Atika Sari and Ian Wahyuni, "Stile Dominan Untuk Capaian Estetis: Kajian Stilistika Lirik Lagu Grup Musik Fourtwnty," *Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics* 7, no. 2 (2021): 386221.

besar yang mereka emban. Narasi "pahlawan tanpa tanda jasa," yang awalnya dimaksudkan untuk menghormati profesi guru, justru menjadi alat hegemoni yang digunakan pemerintah untuk meredam tuntutan kesejahteraan.

Teori hegemoni Antonio Gramsci menggambarkan bagaimana kelompok sosial menggunakan pengaruh secara persuasi untuk memengaruhi kelompok lain tanpa paksaan. Narasi ini terus diperkuat melalui institusi pendidikan dan budaya populer seperti lagu Hymne Guru, sehingga masyarakat, termasuk guru sendiri, menerima kondisi ini tanpa protes berarti.

Secara faktual, status dan kesejahteraan guru di Indonesia sangat timpang, terutama bagi guru honorer. Mereka menghadapi diskriminasi, gaji rendah, dan beban kerja berat. Kondisi ini diperparah dengan ancaman kontrak kerja yang tidak pasti. Julukan "pahlawan tanpa tanda jasa" semakin menambah tekanan, seolah-olah guru harus menerima kondisi tersebut tanpa mempertanyakan hak-hak mereka.

Penguatan narasi ini telah membuat guru sulit memperjuangkan haknya, baik secara material maupun sosial. Dalam jangka panjang, ketidakpedulian terhadap kesejahteraan guru dapat merusak sistem pendidikan Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu ada kesadaran kolektif di kalangan guru untuk bersatu melawan hegemoni yang menekan mereka, serta kebijakan pemerintah yang lebih adil dan berpihak kepada kesejahteraan guru.

## **Daftar Pustaka**

- Basaruddin, Anas. "Secangkir Kopi Untuk Sang Guru: 33 Catatan Reflektif Penuh Inspirasi Untuk Para Pendidik," 2023. <https://philpapers.org/rec/BASSKU>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Faiz, Aiman. "Peran Guru Dalam Pendidikan Moral Dan Karakter." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 315–18.
- Gunawan, Indra. "Hubungan Sebab Akibat Ungkapan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Terhadap Identitas Dan Kesejahteraan Guru Di Indonesia." *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (2018): 123–30.
- Madjid, Dr Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru, 2018.
- Maulidiyah, Anita. "Hegemoni SMA Darul Ulum 2 Unggulan Bppt Jombang Sebagai Cambridge International School (Cis) Id 113." *Paradigma* 5, no. 3 (2017). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/21295>.
- Munawir, Ahmad. "Dimensi Full Day School Dalam Budaya Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer* 2, no. 2 (2019). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/1438>.



- . “Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (September 17, 2019): 110–23.
- Nabhani, Irfan, Mikail Omar Nabhani, and Liani Asmarani Fitri. “Analisis Kondisi Keuangan Guru Honorer Di Jawa Barat Dan Implikasinya Pada Penggunaan Pinjaman Online.” *Jurnal Algoritma* 21, no. 1 (2024): 269–77.
- Pujiharti, Endang. “Peran Sumber Daya Pendidik Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan.” *AN NAHDLIYYAH* 1, no. 2 (2022): 35–50.
- Rumtini, Rumtini. “Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat.” *Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat* 20, no. 2 (2014): 211–22.
- Sari, Norma Atika, and Ian Wahyuni. “Stile Dominan Untuk Capaian Estetis: Kajian Stilistika Lirik Lagu Grup Musik Fourtwnty.” *Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics* 7, no. 2 (2021): 386221.
- Siswati, Endah. “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci.” *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2017): 11–33.
- Sopian, Ahmad. “Tugas, Peran, Dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan.” *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 1, no. 1 (2016): 88–97.
- Sugiharto, Mohammad. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Program Ppg Dan Profesi Guru Terhadap Minat Menjadi Guru Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 3 (2019): 208–17.
- Sulfasyah, Sulfasyah, and Hanis Nur. “Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 2 (2016): 60747.
- Zofiroh, Firani, Dewi Kusuma Wardani, and Khresna Bayu Sangka. “Pengaruh Persepsi Profesi Guru Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Menjadi Guru Ekonomi Dimediasi Oleh Motivasi.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 10, no. 3 (2022): 172–80.